



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA STRATEGIS

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BLUD BPSDKP) WILAYAH SUMBAWA DAN SUMBAWA BARAT**

2024-2026



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat tahun 2024-2026, merupakan salah satu syarat administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 untuk tujuan kelengkapan pengusulan penerapan BLUD.

Dokumen ini memuat uraian tentang kelembagaan serta tugas dan fungsi, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan, serta program dan kerangka pendanaan pada BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dan satuan perangkat kerja di wilayah kerja kawasan konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat, pengelolaan fungsi kerja dan pengelompokan sumber daya manusia, akuntabilitas, transparansi, keuangan dan kebijakan penganggaran.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada tim Penyusun yang telah berupaya menyiapkan dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.

Mataram, Juni 2023

Kepala BLUD UPTD BPSDKP
Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Hamdon, S.Pd.,MM

NIP. 19690424 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Rencana Strategis BLUD	3
1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BLUD	4
1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis.....	4
1.5 Perubahan Rencana Strategis.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	7
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	7
2.2 Gambaran Organisasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	18
2.4 Kinerja Operasi.....	18
2.5 Aspek-Aspek Pertimbangan BLUD UPTD menerapkan BLUD.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	21
3.1 Isu Strategis	22
3.2 Rencana Pengembangan Layanan	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN	36
4.1 Visi dan Misi.....	36
4.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	39
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	43
4.4 Arah Kebijakan	47
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.....	52
5.1 Program dan Indikator.....	52
5.2 Pendapatan BLUD	61
BAB VI PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Tahun 2023.....	14
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Tahun 2020 dan 2021	16
Tabel 3. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022	16
Tabel 4. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022	16
Tabel 5. Capaian Kinerja Operasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Tahun 2021	18
Tabel 6. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	21
Tabel 7. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	21
Tabel 8. Identifikasi SWOT BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	23
Tabel 9. Sasaran Strategis BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	25
Tabel 10. Tujuan Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	41
Tabel 11. Sasaran Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	42
Tabel 12. Matriks TOWS Alternatif Strategi BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	43
Tabel 13. Strategi dan Kebijakan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	49
Tabel 14. Sasaran, Indikator dan Kegiatan	54
Tabel 15. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2023-2026	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTB.....	2
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	10
Gambar 3. Peta Strategi BLUD BLUD UPTD.....	28
Gambar 4. Ilustrasi Model Bisnis Canvas pada BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan belum terkelola secara optimal. Salah satu strategi pengelolaan wilayah perairan yang telah dilakukan adalah melalui pengalokasian ruang laut untuk Konservasi Perairan Daerah (KKD). Kawasan Konservasi Perairan Daerah dihayatkan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pengembangan kawasan konservasi perairan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ini telah menjadi Program Nasional yang dinilai penting dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan ini menjadi salah satu indikator kinerja KKP dalam Sasaran Strategis ke-3 (SS-3) mengenai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada level provinsi berdasarkan kewenangan pada pasal 27 undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) telah menetapkan enam kawasan konservasi daerah dari total 12 kawasan yang telah dicadangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diantaranya kawasan konservasi Gili Sulat Lawang dan Gita Nada di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, Kawasan Konservasi Liang Ngali dan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Kawasan Konservasi Gili Banta dan Teluk Cempi di Kabupaten Bima dan Dompu. Lokasi Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTB terlihat pada Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTB



Untuk mengelola kawasan konservasi di perairan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTB membentuk 3 Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD UPTD) Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) melalui Peraturan Gubernur No.14 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok, BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu. BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini melaksanakan tugas operasional teknis dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus pengawasan pemanfaatan ruang laut dan perizinan usaha kelautan dan perikanan, dimana salah satunya mempunyai wewenang mengelola Kawasan Konservasi di wilayah kerja masing – masing.

Akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaan tugasnya, BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini masih terkendala faktor dana operasional, sumberdaya manusia, benturan regulasi

dalam pengelolaan wilayah dengan Kabupaten dan lainnya. Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas, fungsi BLUD UPTD BPSDKP maka perlu ruang dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Permendagri 79 Tahun 2018 point c, BLUD UPTD BPSDKP dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Kehadiran BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat ini diharapkan mampu mengelola kawasan konservasi dimaksud serta melindungi dan melestarikan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, yang memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Agar pengelolaan BLUD secara maksimal dan efektif, BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat perlu menyusun Rencana Strategis.

1.2 Pengertian Rencana Strategis BLUD

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disebutkan rencana strategis BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam penyusunan Renstra, mengacu pada Perda Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas tahun 2019-2023, sehingga Renstra BLUD ini sesuai periode RPJMD dan Renstra Dinas.

Renstra BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan;
2. Strategi dan arah kebijakan;
3. Rencana program dan kegiatan; dan
4. Rencana keuangan.

1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BLUD

Renstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi RPJMD, dan Renstra Dinas, sehingga arahan kebijakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang pengelola wilayah perairan dan Kawasan Konservasi pada BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.

1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar hukum untuk menyusun Renstra ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
15. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Inmendagri 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

1.5 Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis sebagaimana disebutkan diatas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat serta perubahan lingkungan strategis.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Tugas pokok BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat mengacu pada tugas pokok UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat sebagaimana Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian wilayah pengelolaan kawasan konservasi perairan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.

Sedangkan fungsi BLUD UPTD, sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
2. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
3. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Substansi layanan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah pengelolaan Kawasan perairan yang berada di seluruh Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM), adalah:

1. Layanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan termasuk kawasan Konservasi;
2. Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan termasuk kawasan Konservasi;
3. Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan seluruh kawasan termasuk kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Pelayanan tersebut diberikan dengan mengacu pada Rencana Zonasi pengelolaan wilayah perairan yang termasuk didalamnya Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan. Zonasi Kawasan Konservasi secara umum meliputi zona inti yang ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi, zona pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, serta zona lain sesuai peruntukan kawasan.

Layanan umum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pelayanan dalam konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berhubungan dengan:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi namun, tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum tersebut BLUD UPTD dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang

dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

2. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada Masyarakat. Pengelolaan dana khusus ini meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau dana perumahan.
3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Kawasan tertentu tersebut dalam hal ini adalah Kawasan Konservasi.

Batasan minimal atau ambang batas mengenai jenis dan mutu layanan berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang harus dipenuhi oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dituangkan dalam SPM, dan SPM ini diperlukan dalam penyusunan RBA.

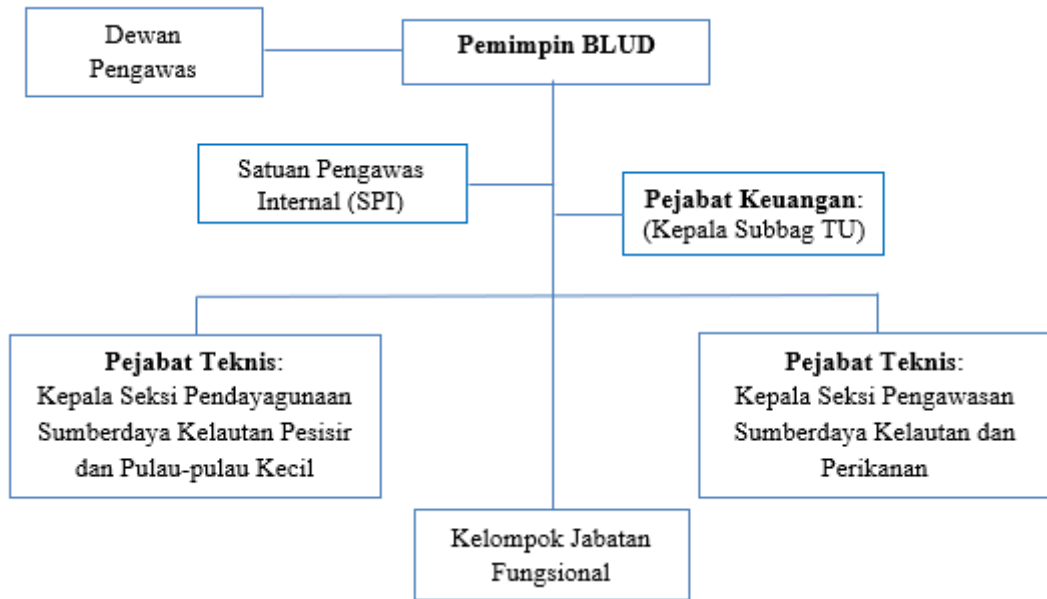
2.2 Gambaran Organisasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

A. Struktur Organisasi BLUD UPTD

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat yang telah menerapkan BLUD terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis. Pejabat teknis ini mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Struktur Organisasi BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (sebagaimana pada Gambar 2), terdiri dari:

1. Pemimpin BLUD UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Dewan Pengawas;
6. Satuan Pengawas Internal; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Dalam pengelompokan fungsi pada Pola Tata Kelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian tujuan. BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat yang menerapkan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat yang menerapkan BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Uraian tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala BLUD UPTD mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan strategis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

- b. Membantu memfasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. Membantu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Membantu memfasilitasi proses perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak bumi dan gas;
- e. Melaksanakan pengawasan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya;
- f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan Subag TU;
- b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, laporan kegiatan Sub bagian TU dan Laporan tahunan;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip dan perlengkapan kantor;
- d. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau atau asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis;

- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi: Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, Bahan kenaikan pangkat, bahan pensiun dan mutasi, Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti.
 - g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk: Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program, Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi;
 - b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
 - c. Menyiapkan bahan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk kawasan konservasi di Wilayah Kerjanya;
 - d. Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
 - f. Menyiapkan bahan mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan perairan di Wilayah Kerjanya;
 - g. Menyiapkan bahan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;

- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;
4. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- a. Menyiapkan bahan rumusan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi ;
 - b. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional pengawasan;
 - d. Menyiapkan bahan kegiatan penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan serta pelayanan dan informasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan di perairan umum di wilayah kerjanya;
 - f. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Dewan Pengawas
- a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) Persoalan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat; dan

3) Kinerja BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat.

6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BLUD BPSDKP dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Sub kelompok Jabatan Fungsional BLUD BPSDKP SSB sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sub kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior. Sub kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD BPSDKP SSB. Pejabat Fungsional Senior ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BLUD BPSDKP SSB diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

1. Sumber Daya Manusia / Pegawai

SDM/Pegawai di BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Tahun 2023

No	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2024	Keterangan
1	Kepala BLUD UPTD	ASN	1	1	BPSDKP SSB
2	Kasubag TU	ASN	1	1	BPSDKP SSB
	a. Koordinator Administrasi,	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB

No	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2024	Keterangan
	Kepegawaian dan Logistik				
	1) Staf Administrasi Umum	ASN/Non ASN	1	1	BPSDKP SSB
	2) Staf Kepegawaian	ASN/Non ASN	1	1	BPSDKP SSB
	3) Staf logistik	ASN/Non ASN	1	1	BPSDKP SSB
	4) Satpam	Non ASN	1	2	BPSDKP SSB
	5) <i>Office Boy</i>	Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	b. Koordinator Keuangan	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	1) Akuntan	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	2) Bendahara Pengeluaran	ASN	1	1	BPSDKP SSB
	3) Bendahara Pendapatan	ASN	0	1	BPSDKP SSB
	c. Koordinator Komunikasi	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	1) Staf Admin <i>Website/Sosmed</i>	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	2) Staf Penjangkauan	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	3) Staf Pengelolaan Data & Informasi	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	4) Staf <i>Branding & Promosi</i>	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
3	Kasi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	ASN	1	1	BPSDKP SSB
	a. Koordinator Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	1) Staf Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	b. Koordinator Teknis	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	1) Staf Teknis Bio-ekologi	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	2) Staf Teknis Sosekbud	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
4	Kasi Pengawasan SDKP	ASN	1	1	BPSDKP SSB
	1) Staf pengawasan/ Jaga Laut	ASN/Non ASN	1	1	BPSDKP SSB
	2) Staf penyuluhan	ASN/Non ASN	0	1	BPSDKP SSB

No	Jabatan	Status (PNS/ Profesional)	Saat ini	Kebutuhan s/d 2024	Keterangan
	3) Staf Pemantauan sumberdaya kawasan	ASN/Non ASN	1	1	BPSDKP SSB
	4) Nahkoda <i>speed boat</i>	Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	5) Asisten Administrasi	Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	6) Asisten Logistik	Non ASN	0	1	BPSDKP SSB
	7) Penjaga Pos Pengawasan	Non ASN	0	2	BPSDKP SSB

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan di BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dapat diikuti dalam tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Tahun 2020 dan 2021

Komponen	Nilai 31 Desember 2021	Nilai 31 Desember 2022	Keterangan
Penerimaan	0	0	Retribusi pelayanan
Kas dan setara kas	0	0	Belum ada penerimaan

Sumber: Laporan Keuangan BLUD UPTD Tahun 2021 dan 2022

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana prasarana di BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022

Komponen	Nilai 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	1.475.259.936
Gedung dan Bangunan	3.438.464.250

Sumber: Laporan Aset BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat 2022 (angka yang ditampilkan adalah ilustrasi)

Tabel 4. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2022

SPESIFIKASI BARANG Nama / Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket
				Barang	Harga (Rp)	
Peralatan selam lainnya (dst)	Pembelian	2020	Baik	1	99.900.000	
Station Wagon (Toyota / Kijang Inova G)	Pembelian	2007	Baik	1	152.680.000	
Sepeda Motor (VARIO 125 CBS ISS MMC 2017)	Pembelian	2017	Baik	3	56.652.231	

SPESIFIKASI BARANG	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Ket
				Barang	Harga (Rp)	
Speed Boat / Motor Tempel	Pembelian	2021	Baik	1	771.305.205	
Global Positioning System	Pembelian	2019	Baik	1	14.170.000	
Global Positioning System	Pembelian	2019	Baik	1	13.200.000	
Mesin Absen (Time Recorder)	Pembelian	2017	Baik	1	5.912.500	
Papan Pengumuman	Pembelian	2019	Baik	1	9.900.000	
Alat Kantor Lainnya	Pembelian	2021	Baik	1	32.835.000	
Kursi Tamu	Pembelian	2019	Baik	1	12.100.000	
Lemari Es	Pembelian	2019	Baik	1	4.950.000	
A.C. Split	Pembelian	2019	Baik	3	14.850.000	
Treng Air/Tandon Air	Pembelian	2018	Baik	1	7.500.000	
Treng Air/Tandon Air	Pembelian	2019	Baik	1	6.000.000	
Wireless	Pembelian	2019	Baik	1	4.950.000	
Camera film	Pembelian	2017	Baik	1	4.950.000	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	Baik	1	3.500.000	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	Baik	3	7.500.000	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Pembelian	2017	Baik	6	10.500.000	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2017	Baik	1	2.745.000	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2017	Baik	3	4.500.000	
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Pembelian	2019	Baik	6	5.700.000	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	2019	Baik	1	5.775.000	
Layar Film/Projector	Pembelian	2019	Baik	1	9.350.000	
Handy Talky (HT)	Pembelian	2019	Baik	9	26.235.000	
Alat komunikasi radio hf/fm lainnya	Pembelian	2019	Baik	1	4.435.000	
Under Water Camera	Pembelian	2019	Baik	1	19.800.000	
Alat Selam	Pembelian	2019	Baik	3	100.630.000	
P.C Unit	Pembelian	2019	Baik	2	18.700.000	
Lap Top	Pembelian	2017	Baik	1	9.900.000	
Lap Top	Pembelian	2019	Baik	2	19.690.000	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2017	Baik	1	2.970.000	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2017	Baik	1	2.475.000	
Gedung Pos Jaga Permanen	Pembelian	2021	Baik	1	503.130.500	
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Pembelian	2016	Baik	1	179.916.250	
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Pembelian	2017	Baik	3	400.907.500	
Bangunan Gedung	Pembelian	2021	Baik	1	1.634.805.000	
Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Pembelian	2021	Baik	1	1.634.805.000	
Bangunan Gedung	Pembelian	2019	Baik	1	719.705.000	
Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	Pembelian	2019	Baik	1	719.705.000	
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembelian	2020	Baik	1	19.855.000	

Sumber: Laporan inventaris barang BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

2.3 Kinerja Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Sejak dibentuk hingga saat ini operasional UPTD sebelum dibentuk menjadi BLUD sudah berjalan tahun kedua. Dengan penerapan BLUD, diharapkan ke depan kinerja pelayanan BLUD UPTD diharapkan dapat berjalan efektif dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan sesuai Tata Kelola, SPM dan Renstra yang telah disusun untuk mencapai hasil yang maksimal. Kinerja pelayanan dan evaluasinya didasarkan pada laporan kinerja yang ada.

2.4 Kinerja Operasi

Pada tahun anggaran 2021, pelayanan teknis dan operasional pada UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program penunjang, yaitu;

- 1) Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 2) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terhadap capaian kinerja kedua program teknis tersebut rata-rata 95.11%

Tabel 5. Capaian Kinerja Operasi BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Tahun 2021

No	Indikator	Capaian 2021
1	Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	1.1. Rekomendasi perizinan pariwisata alam perairan	0%
	1.2. Rekomendasi perizinan transportasi perairan	0%
	1.3. Rekomendasi perizinan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	0%
	1.4. Pendidikan konservasi dan Lingkungan Hidup serta penyadartahuan masyarakat	100%
	1.5. Kemitraan dengan masyarakat	100%
	1.6. Pendampingan kelompok masyarakat	100%
	1.7. Tersedia pusat informasi pelestarian kawasan konservasi dan taman laut	100%
	1.8. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi	100%
	1.9. Pelaksanaan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	100%
	1.10. Perlindungan terhadap aturan zonasi di kawasan konservasi	100%
	1.11. Pelaksanaan Perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya	100%

2	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2.1. Pengawasan terhadap aturan zonasi	77,17%
	2.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan	78,86%

Sumber: laporan tahunan BPSDKPSumbawa-Sumbawa Barat 2021

2.5 Aspek-Aspek Pertimbangan BLUD UPTD menerapkan BLUD

BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk didalamnya kawasan konservasi, agar lebih efektif maka diterapkan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sistem BLUD ini diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana BLUD UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Dengan penerapan sistem BLUD, maka fleksibilitas pengelolaan yang diberikan, yaitu:

1. Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan;
2. Pengelolaan barang dan/atau jasa;
3. Pengelolaan hutang dan piutang;
4. Pengelolaan investasi jangka pendek;
5. Pengelolaan penerimaan hibah; dan
6. Kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu hal penting dari penerapan BLUD tersebut adalah kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan agar pelayanan dan pengelolaan kawasan konservasi lebih efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja BLUD UPTD dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Dengan berlakunya fleksibilitas dalam penerapan BLUD, maka penerimaan BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, yang berasal dari Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (TLPJL) dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selain dari jasa layanan tersebut, sumber pendapatan BLUD berasal dari APBD sebagaimana unit kerja lain di bawah Dinas, penerimaan hibah dari lembaga non pemerintah dan/atau pemberi hibah/donor, dan kerjasama program dengan pihak lain.

Dengan penerapan BLUD pada BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, maka dimungkinkan untuk menyusun struktur kelembagaan yang lebih luwes untuk mendukung operasional pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan Kawasan Konservasi, sebagaimana terlihat pada struktur organisasi BLUD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat merupakan *entry point* dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang valid tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Masalah	Akar Permasalahan
Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan	Belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan Masih tingginya kasus konflik antar nelayan
Terbatasnya cakupan wilayah pengawasan sesuai kewenangan	Operasional pengawasan terbatas Belum efektifnya Satgas Pengawasan SDKP
Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	Tidak seimbangny upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut Masih terbatasnya pengelolaan sampah di wilayah pesisir Terbatasnya upaya penanganan sampah laut Sosialisasi terhadap peraturan pengelolaan perikanan berkelanjutan belum massif dilakukan Belum terkelolanya kawasan konservasi perairan secara efektif

Tabel 7. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi	Permasalahan
Kawasan Konservasi Perairan serta pelestarian keanekaragaman hayati belum maksimal	Belum terkelolanya kawasan konservasi secara maksimal	Kawasan Konservasi yang ada belum mandiri
	Masih adanya aktifitas yang tidak ramah lingkungan dan	Belum optimalnya pengelolaan dan

Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi	Permasalahan
	kontra produktif dengan kegiatan perikanan	pemanfaatan wilayah pesisir
IUU Fishing (illegal unreported and regulated Fishing) masih terjadi	Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat (POKMASWAS) masih kurang keaktifannya	Masih Terjadinya kasus IUU fishing di perairan NTB
	Belum optimalnya operasi pengawasan dan koordinasi satgas pengawasan lintas sektoral penegak hukum (KKP RI, POLRI, TNI dan KUMHAM)	
	Kurangnya kesadaran Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengajukan Izin	Belum optimalnya fasilitasi pengurusan perizinan bidang kelautan dan perikanan

3.1 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil analisis, identifikasi permasalahan terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya dan analisis lingkungan strategis maka isu - isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB adalah :

- 1) Belum optimalnya kontribusi PDRB sektor perikanan
- 2) Belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan
- 3) *Destructive fishing, overfishing* dan perizinan usaha perikanan
- 4) Konsumsi ikan masih dibawah konsumsi ikan nasional
- 5) Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan
- 6) Kompetensi sumberdaya manusia aparaturnya dan masyarakat perikanan
- 7) Sampah Laut

Sehingga rumusan isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah :

- 1) *Destructive fishing, overfishing* dan perizinan usaha perikanan;
- 2) Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan;
- 3) Kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat perikanan;
- 4) Sampah Laut (*Debrise Marine*).

3.1.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT atau *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu strategis BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. *Strengths* dan *Weaknesses* adalah bagian dari analisis internal organisasi, sedangkan *Opportunities* dan *Threats* adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal organisasi. Hasil identifikasi komponen analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Identifikasi SWOT BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan potensi industri kelautan dan wisata yang tinggi; 2. SDM energik dan teamwork yang solid; 3. Kemampuan berkoordinasi dengan stakeholders industri kelautan dan pariwisata relatif baik; 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik; 5. Landasan hukum BLUD UPTD dalam pengelolaan zona jelas (masuk sebagai program nasional); 6. Terdapat potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner; 7. Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri yang telah beroperasi di wilayah Perairan Pulau Sumbawa-Sumbawa Barat 8. Masyarakat ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing.
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kompetensi SDM BLUD UPTD belum memadai; 2. Kurangnya peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan kawasan; 3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi; 4. Zona pemanfaatan belum terkendali secara baik; 5. Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif terbatas; 6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata; 7. Destinasi wisata belum dikembangkan;

	8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial terpisah dari program konservasi kelautan; 9. Rendahnya daya dukung infrastruktur daerah; 10. Rendahnya kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan.
Peluang	1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional; 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat; 3. Kawasan relatif aman; 4. Kerja sama internasional/Donor sangat dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan konservasi; 5. Minat <i>ecotourism</i> masyarakat meningkat; 6. Potensi dan minat investor tinggi; 7. Beberapa objek pariwisata alam relatif telah dikenal oleh wisatawan Internasional terutama minat khusus.
Ancaman	1. Ketidaksinkronan perencanaan antarstakeholders, baik di pusat maupun daerah; 2. Pemahaman masyarakat terhadap zonasi Kawasan konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari; 3. Dukungan masyarakat adat sangat tergantung isu yang dihadapi; 4. Pembangunan pariwisata akan membebani dan mengancam upaya konservasi; 5. Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia

Sumber: Ilustrasi Hasil Analisis Lingkungan Strategis

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi strategi generik yang akan menjadi arah umum organisasi dalam 2 (dua) tahun kedepan (disesuaikan dengan periode Renstra yang akan disusun) Dalam kuadran ini strategi umum yang disarankan adalah *Hold and Maintain*, yaitu:

- a. *Market Penetration* (meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran);
- b. *Product Development* (meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/ layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru).

Pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan. Sebagai BLUD, BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan

tugas organisasi, dan mampu mengembangkan penerimaan yang cukup untuk membiayai operasinya secara mandiri.

Tabel 9. Sasaran Strategis BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Sasaran	Obyektif
Strategi SO	
1. Menjadikan pengembangan zona konservasi TWP Gili Balu, TWP Liang Ngali, TPK Pulau Kramat Bedil dan Temudong, TT Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit, KKP3K Pulau Panjang, dan KKP Pulau Medang sebagai kegiatan prioritas kabupaten Sumbawa-Sumbawa Barat dan provinsi NTB.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia
2. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>eco-tourism</i> dan pariwisata berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun zona pemanfaatan secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan b. Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar <i>green/sustainable tourism</i> c. Memanfaatkan media publikasi dan promosi
3. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pemberi Hibah (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi kawasan konservasi berjalan efektif b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan
Strategi WO	
1. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan dukungan anggaran Daerah b. Memastikan dukungan RTRW dan zonasi pembangunan dari Daerah c. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/keselamatan) di zona pemanfaatan
2. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi,

Sasaran	Obyektif
profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> dan berstandar internasional b. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan operasional c. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan
3. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke Pusat b. Membentuk kerja sama dengan pemberi Hibah
Strategi ST	
1. Memastikan penelitian mendukung pengembangan dan pemanfaatan zonasi konservasi yang aman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan b. <i>Feedback</i> hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan
2. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun rasa memiliki dari masyarakat b. Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan
3. Nota kesepahaman dengan <i>stakeholders</i> kepariwisataan	Mengembangkan kerja sama dan jejaring kerja
Strategi WT	
1. Pembatasan pembangunan dan pemanfaatan di zona inti dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan b. Membangun ekonomi masyarakat
2. Pendidikan SDM daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan keterampilan SDM BLUD UPTD untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi b. Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi

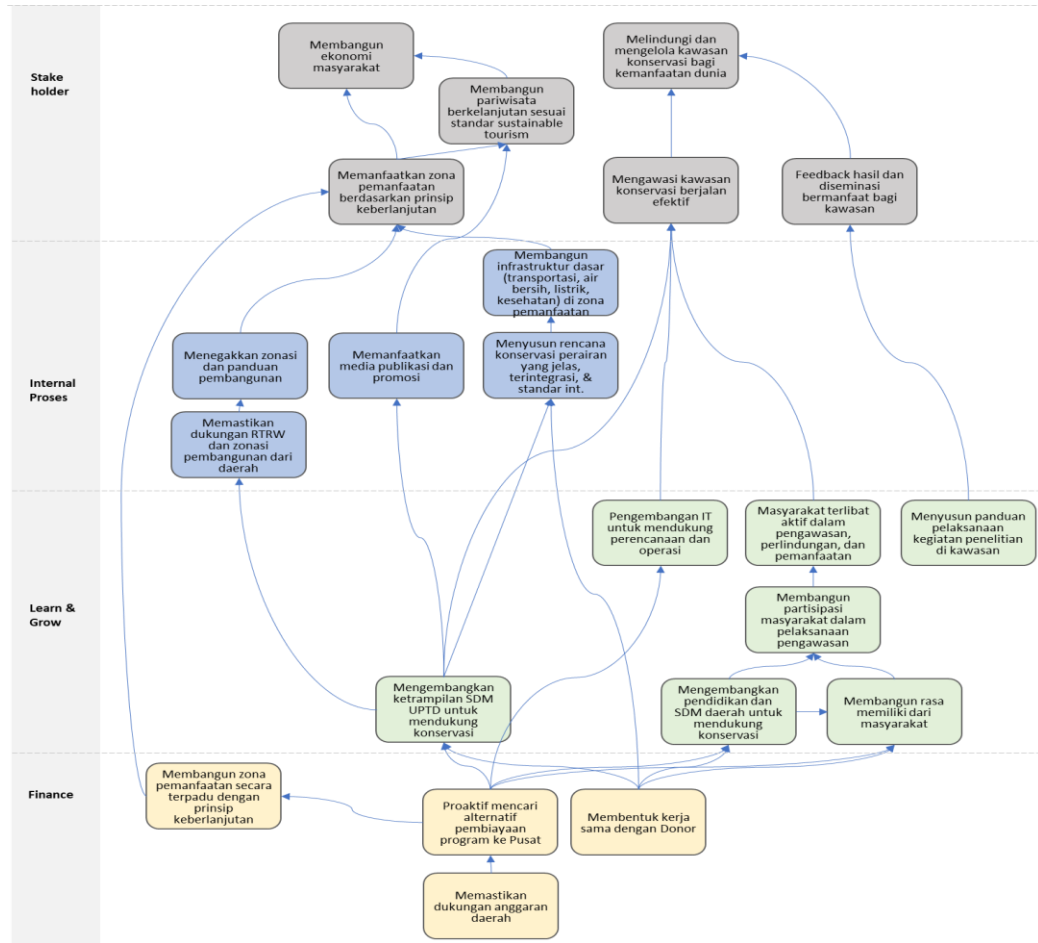
Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.1.2. Peta Strategi

Sasaran strategis seperti tersebut diatas kemudian dipetakan dalam peta strategi, yang tergambar dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Peta strategi digunakan untuk membantu melihat apakah ada perspektif strategi yang belum memperoleh perhatian yang cukup dalam analisis ini.

Pemetaan dilakukan menggunakan strategi *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learn and Growth*, serta *Finance*. Keempat perspektif ini diambil dari konsep *Balanced Scorecard* untuk memudahkan pemahaman. Masing-masing sasaran strategis dikategorikan ke dalam keempat perspektif ini. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar 17.

Dari pemetaan (Gambar 17) tampak bahwa isu strategis yang dihadapi oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dalam mencapai tujuannya, antara lain dari segi keuangan, isu utama yang dihadapi adalah menghasilkan penerimaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan yang dihadapi. Dari segi pertumbuhan, isu utama yang dihadapi adalah mengembangkan SDM dan membina dukungan masyarakat. Dari segi proses internal, isu strategis yang dihadapi adalah menegakkan zonasi dan panduan pembangunan di masing-masing kawasan, menyusun rencana pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan yang jelas dan terintegrasi, membangun infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana, serta memastikan kerja sama yang baik dengan unit kerja yang lain. Dari sisi pemangku kepentingan, isu strategis yang dihadapi adalah meningkatkan kegiatan monitoring, memanfaatkan zona, dan membangun ekonomi masyarakat.



Gambar 3. Peta Strategi BLUD BLUD UPTD
 Sumber: ilustrasi Hasil Pengolahan Data

3.2 Rencana Pengembangan Layanan

3.2.1 Model Bisnis BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Model bisnis adalah konsep tentang bagaimana semua aspek utama bisnis saling berkaitan satu sama lain. Ini termasuk mengidentifikasi pelanggan dan mitra serta hubungannya terhadap nilai yang diproduksi/diciptakan oleh bisnis yang dimaksud, mengidentifikasi bagaimana pendapatan dihasilkan, serta mengidentifikasi bagaimana produk akan diproduksi/diciptakan dan dipasarkan termasuk biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukannya. Singkatnya, hasil dari model bisnis adalah rencana terperinci tentang bagaimana bisnis beroperasi.

Model Bisnis Kanvas (*Business Model Canvas – BMC*) adalah dokumen satu halaman sederhana yang dipecah menjadi sembilan blok

yang bekerja melalui semua elemen fundamental dari model bisnis. Kanvas ini dimaksudkan untuk mempermudah mengartikulasikan dengan lebih baik semua segmen yang berbeda dari model bisnis secara koheren sehingga membuat ide bisnis menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingan. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder selama pekerjaan PhD-nya di *University of Lausanne*.

BMC terdiri dari 9 blok yang diatur dalam 4 area utama: (1) pelanggan; (2) penawaran; (3) infrastruktur; dan (4) kelangsungan finansial.

1. Pelanggan (*customer*), terdiri dari “*customer segment*”, “*channel*”, dan “*customer relationships*”.
2. Penawaran (*offering*), mencakup “*value proposition*” perusahaan kepada pelanggannya (dan pemangku kepentingan).
3. Infrastruktur (*infrastructure*), terdiri dari “*key partners*”, “*key activities*” yang dilakukan, dan “*key resources*” yang digunakan.
4. Kelangsungan finansial (*finance*), terdiri dari “*revenue stream*” dan “*cost structure*”.

Sisi kanan BMC berfokus pada penyampaian nilai kepada pelanggan sedangkan sisi kiri berfokus pada penciptaan nilai itu. Hasil identifikasi model bisnis BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah sebagai berikut.

1. *Customer Segments* atau Segmen Pelanggan adalah berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis yang dimaksud. Ini termasuk pengguna yang mungkin tidak menghasilkan pendapatan tetapi diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Hasil identifikasi menunjukkan segmen pelanggan BLUD adalah:
 - a. wisatawan;
 - b. masyarakat di wilayah BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 - c. peneliti/komunitas ilmiah.
2. *Value Proposition* atau Proposisi Nilai menjelaskan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu. *Value proposition* BLUD adalah:

- a. perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas;
 - b. pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal;
 - c. prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan;
 - d. perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan;
 - e. lahan Clean and Clear (CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun;
 - f. transparansi dan fasilitasi perizinan;
 - g. sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan berstandar internasional;
 - h. pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata dan potensi di wilayah perairan Pulau Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 - i. produk lokal berkualitas yang dikenal sampai tingkat nasional.
3. *Channels* atau saluran menjelaskan bagaimana berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai yang ditawarkan oleh bisnis yang dimaksud. Saluran kepada *customer* BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dapat melalui:
- a. *Website*;
 - b. *Iklan promosi media*;
 - c. *Travel agents*;
 - d. *Forum bisnis*;
 - e. *Sosial Media*;
 - f. *Forum komunikasi*; dan
 - g. *Asosiasi pariwisata*
4. *Customer Relationship* atau hubungan pelanggan menjelaskan jenis hubungan yang dibangun dengan segmen pelanggan tertentu. *Customer relationship* BLUD dengan pelanggan adalah:
- a. partisipasi masyarakat;
 - b. kerja sama
 - c. kunjungan perusahaan;
 - d. tourist and travel event; dan
 - e. media dan sosial media.
5. *Key Activities* atau aktivitas utama menjelaskan kegiatan yang

dilakukan bisnis yang dimaksud agar model bisnis berfungsi. *Key activities* BLUD adalah:

- a. perencanaan dan pengawasan zona inti, zona perikanan, dan zona pemanfaatan.
- b. penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan
- c. membangun kerjasama dan jejaring dengan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, pemberi Hibah, investor, dan lembaga pendidikan;
- d. penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona perikanan dan zona pemanfaatan;
- e. dukungan pengurusan perizinan;
- f. identifikasi potensi kawasan sebagai modal;
- g. menyusun profil kegiatan kelautan dan pariwisata yang dapat dikembangkan/ dikerjasamakan;
- h. pengembangan industri kelautan dan pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip berkelanjutan;
- i. pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan kepariwisataan;
- j. membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital;
- k. perkuatan branding destinasi wisata bahari;
- l. forum komunikasi dan koordinasi pengembangan kawasan wisata bahari;
- m. pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, homestay, dan restoran di zona pemanfaatan);
- n. desain destinasi dan rute arus wisatawan;
- o. fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan layanan;
- p. subsidi pendidikan, beasiswa, SDM lokal untuk kelautan dan pariwisata;
- q. penjaminan bagi program pembiayaan; dan
- r. pengembangan rasa memiliki.

6. *Key Resources* atau sumber daya utama menjelaskan aset paling penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis dapat berfungsi. *Key resources* BLUD adalah:
 - a. Zonasi Kawasan diluar dan dalam kawasan konservasi;
 - b. kekayaan alam;
 - c. SDM;
 - d. aset BMN/D;
 - e. teknologi informai; dan
 - f. pendanaan.
7. *Key Partners* atau mitra utama berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Hubungan dengan *key partners* mempengaruhi suksesnya suatu bisnis karena bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. *Key partners* teridentifikasi adalah:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. K/L terkait (KLH, Kemenparekraf, Kemenhub, Kemen PUPR);
 - c. pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - d. masyarakat di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
 - e. usaha kecil dan menengah lokal;
 - f. pelaku usaha pariwisata;
 - g. media;
 - h. lembaga keuangan;
 - i. lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - j. pemberi Hibah/donor; dan
 - k. investor.
8. *Revenue Streams* atau arus pendapatan mewakili cara bisnis yang dimaksud dalam menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. *Revenue streams* BLUD adalah:
 - a. pendapatan hibah dari pemberi Hibah/Donor;
 - b. jasa lingkungan;
 - c. jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan;
 - d. jasa kerja sama operasi di zona konservasi;

- e. pendapatan retribusi; dan
 - f. jasa lainnya.
9. *Cost Structure* atau struktur biaya meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan Proposisi Nilai bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat dan meminimalkan risiko kerugian. *Cost structure* sementara BLUD adalah:
- a. biaya perencanaan dan riset;
 - b. biaya operasi pengawasan dan perlindungan zona konservasi;
 - c. biaya pembangunan zona pemanfaatan;
 - d. biaya operasi zona pemanfaatan;
 - e. biaya promosi dan event;
 - f. biaya Remunerasi Pegawai;
 - g. biaya operasi kantor;
 - h. biaya transportasi dan perjalanan dinas;
 - i. biaya komunikasi dan teknologi informasi;
 - j. biaya pelatihan;
 - k. biaya pertemuan dan koordinasi; dan
 - l. biaya administrasi umum.

Masing-masing blok kemudian dimasukkan ke dalam kanvas untuk membentuk model bisnis kanvas seperti tampak dalam bagan berikut ini. Model bisnis memudahkan analisis lingkungan dan keuangan yang akan dilakukan, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan dan lingkungan yang dihadapi oleh BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. Sesuai analisis lingkungan dan isu strategis yang dihadapi, maka arah umum pengembangan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah:

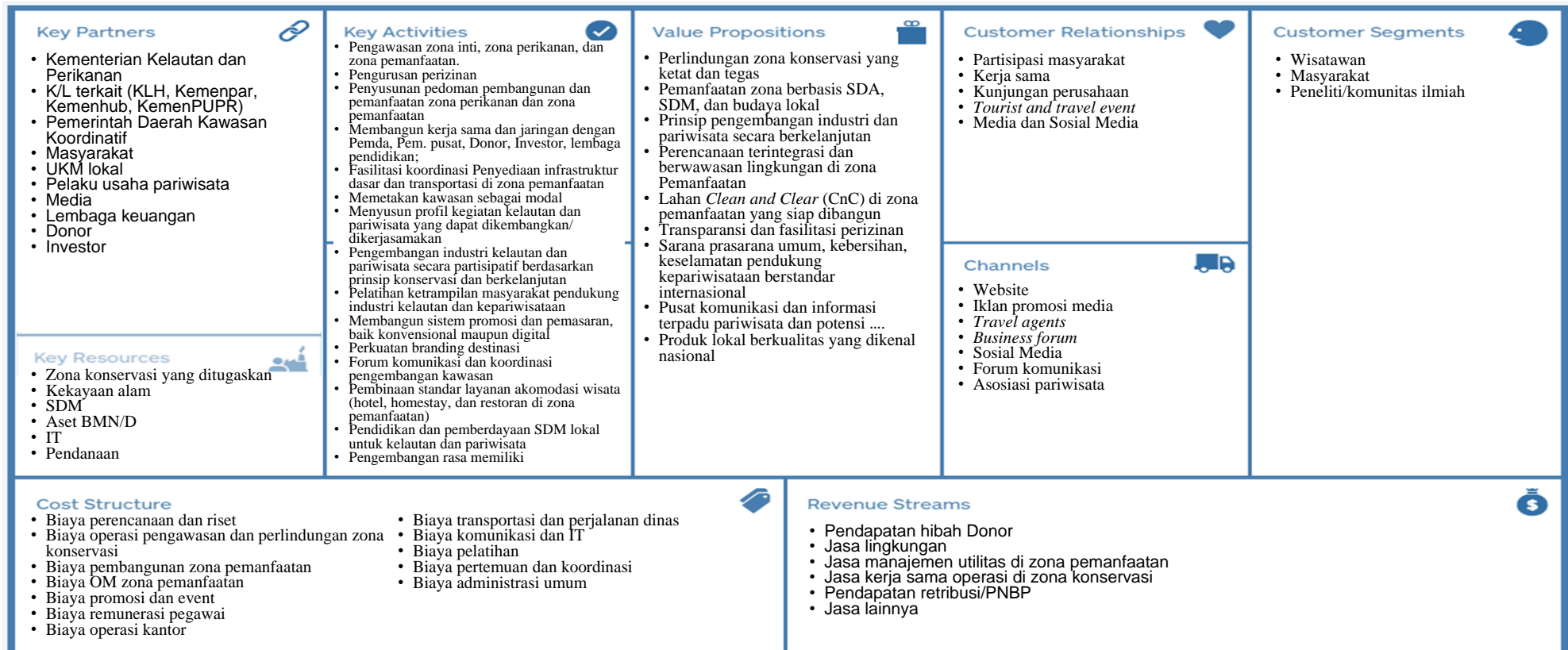
1. ***Product Development***, meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru.

Potensi wisata bahari tergolong menjanjikan di kawasan perairan wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat antara lain untuk menyelam, *trecking*, tirta, serta melihat karst.

Untuk bisa dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut, BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat harus melakukan pengembangan agar potensi dapat memberikan manfaat pada ekonomi masyarakat lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, dalam kerangka konservasi perairan. Tanpa alternatif tersebut, masyarakat tidak akan tertarik untuk membantu menjaga Kawasan konservasi.

- 2. *Market Penetration*,** meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran. BLUD UPTD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat memiliki keuntungan karena berdekatan dengan wilayah wisata perairan Gili Tramen. yang lebih dahulu dikenal secara luas. Kedekatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar.

Pada BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat maka kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan, sebagaimana dijelaskan di awal, terutama terkait dengan upaya pengembangan usaha untuk pendapatan/penerimaan guna pembiayaan operasional secara mandiri



Gambar 4. Ilustrasi Model Bisnis Canvas pada BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Sebagai daerah yang berakhir masa pemerintahan kepala daerahnya pada tahun 2023, maka sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, pedoman dan acuan dalam penyusunan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 mengacu kepada dokumen RPJPsD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Tertuang visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2025, sebagaimana diuraikan berikut :

a. Visi

Visi pembangunan Daerah dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi pada RPJPD 2005-2025, didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengemban tugas untuk melaksanakan sasaran prioritas daerah yaitu :

1. Pembangunan manusia yang KUAT (Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa).
2. Pembangunan lingkungan lestari dan asri
3. Pembangunan kesejahteraan Masyarakat yang mandiri
4. Peningkatan tatakelola pemerintahan daerah
5. Peningkatan komitmen dan capain tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
6. Peningkatan daya saing daerah dengan kemajuan industrialisasi dan investasi.

Melihat dari Visi, Misi dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026, serta isu strategis aktual dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang cukup kompleks dan dinamis maka diperlukan langkah – langkah efektif melalui formulasi penyusunan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : Meningkatkan kontribusi PDRB sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan
3. Meningkatnya produksi perikanan
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan
5. Meningkatnya system pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Tersedianya regulasi/kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif
7. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
8. Terwujudnya birokrasi dinas kelautan dan perikanan yang efektif dan berorientasi pelayanan prima
9. Terkelolanya anggaran pembangunan kelautan dan perikanan secara efisien dan akuntabel

Dalam penetapan rencana strategis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pulau Sumbawa-Sumbawa Barat, berdasarkan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2024 -2026, BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat mendukung pencapaian seluruh sasaran pembangunan tersebut dan merumuskan penetapan visi dan misi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat yang relevan dengan tujuan dan sasaran renstra dinas yang dirancang bersinergi, adaptif, dan akomodatif dengan visi pemerintah Provinsi NTB, serta Renstra Dinas. Visi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat mengacu dan menggabungkan kedua visi kawasan konservasi di atas dengan pandangan yang berorientasi terhadap masa depan dan didasarkan pada nilai dan prinsip penghargaan pada masyarakat.

Visi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah:

“Terwujudnya Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Yang Lestari, Melalui Pengelolaan Yang Mandiri Dan Berkelanjutan”

Mengacu pada visi tersebut, Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertahankan jasa-jasa ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, pariwisata alam dan industri kelautan yang berkelanjutan. Visi diatas merepresentasikan sebuah tata kelola pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sarana untuk mempertahankan sumber daya perairan dan pemanfaatan jasa-jasa ekosistem secara berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar yang berada di wilayah perairan Pulau Sumbawa-Sumbawa Barat.

Adapun Misi BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan dan ekosistem perairan dengan mengatur penggunaan dan pemanfaatan SDKP melalui pengendalian dan pengawasan seluruh kawasan perairan yang ada di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.
2. Memanfaatkan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan melalui pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dan memperhatikan ketahanan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM Pegawai BLUD, institusi lokal (adat) dan masyarakat untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumber daya dan jasa kelautan.

Misi tersebut dimaksudkan untuk merangsang daya saing BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan PPK serta pedoman bagi Pegawai untuk memahami tujuan pengelolaan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Mengacu kepada Rencana Strategis dinas dan materi teknis RZWP3K, pengelolaan wilayah perairan dan kawasan konservasi di wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat diarahkan untuk “menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem”.

Sehingga dapat dirumuskan tujuan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan di wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dengan indikator Cakupan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (%)

2. Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dengan indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (%)
3. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan, dengan indikator tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi (%)

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator nilai Evika;
2. Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dengan indikator Persentase wilayah perairan dan KKD bebas *Destuctive Fishing*;
3. Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya, dengan indikator persentase pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya (%);
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai);
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), dengan indikator cakupan SDM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (%);
6. Meningkatnya kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dengan indikator jumlah mitra pembangunan BPSDKP di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (PKS).

Tabel 10. Tujuan Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan			
		2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan di wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	Cakupan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (%)	30	40	45	80	
Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (%)	45	55	65	80	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan	Persentase tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi (%)	23	30	40	50	

Tabel 11. Sasaran Pelayanan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
		2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Nilai EVIKA (KKD Liang Ngali = 47,92; KKD Gili Balu = 40,03)	43,98	51	60	85	
Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dengan indikator	Persentase wilayah perairan dan KKD bebas <i>Destuctive Fishing (%)</i>	72,5	75	78	80	
Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya	persentase pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya (%);	50	60	70	80	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai);	67	70	80	90	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola)	Cakupan SDM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (%);	40	55	70	80	
Meningkatnya kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	Jumlah mitra pembangunan BPSDKP di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat (PKS).	2	5	6	7	

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

4.3.1 Strategi Alternatif

Dari hasil analisis SWOT, yang kemudian dimasukkan ke dalam Matriks TOWS, akan terlihat strategi alternatif yang dapat diambil oleh organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, untuk berhadapan dengan peluang dan tantangan dari luar organisasi. Strategi alternatif dimaksud, yaitu:

- a. Strategi S-O, adalah strategi yang dipilih untuk menggunakan Kekuatan organisasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Strategi W-O, adalah strategi untuk mengurangi kekurangan organisasi sehingga tidak menutupi peluang yang ada;
- c. Strategi S-W, adalah strategi memanfaatkan kekuatan organisasi untuk menghadapi atau menghindari ancaman;
- d. Strategi W-T, adalah strategi melindungi kelemahan organisasi agar tidak dihabisi oleh ancaman yang dihadapi.

Gambaran strategi alternatif SO, ST, WO, dan WT sesuai matriks TOWS untuk BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dapat dilihat dalam tabe 10.

Tabel 12. Matriks TOWS Alternatif Strategi BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

		Kekuatan	Kelemahan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki zona konservasi yang luas dan berpotensi industri kelautan dan wisata yang tinggi 2. SDM energik dan <i>teamwork</i> yang solid 3. Kemampuan berkoordinasi dengan <i>stakeholders</i> industri kelautan dan pariwisata relatif baik 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik 5. Landasan hukum BLUD UPTD dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kompetensi SDM BLUD UPTD belum memadai 2. Peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan terbatas 3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi 4. Zona pemanfaatan belum dipetakan secara baik 5. Lahan yang dapat diusahakan

		Kekuatan	Kelemahan
		<p>pengelolaan zona jelas (dan masuk program nasional)</p> <p>6. Potensi wisata alam, seni-budaya, dan wisata kuliner</p> <p>7. Ikon wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat relatif telah dikenal secara Nasional</p> <p>8. Pelaku industri pariwisata dalam negeri banyak telah beroperasi di Sumbawa-Sumbawa Barat</p> <p>9. Masyarakat relatif ramah dan terbuka terhadap turis asing</p>	<p>(<i>saleable area</i>) relatif sedikit</p> <p>6. Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata;</p> <p>7. Destinasi wisata belum dikembangkan</p> <p>8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial per daerah</p> <p>9. Daya dukung infrastruktur daerah rendah</p> <p>10. Kewirausahaan masyarakat terkait kelautan dan kepariwisataan rendah</p>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat 3. Kawasan relatif aman 4. Kerja sama internasional/pemberi Hibah sangat memungkinkan untuk pembangunan zona konservasi 5. Minat <i>ecotourism</i> meningkat 6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi 7. Tingginya potensi dan minat investor 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadikan pengembangan zona Kawasan konservasi sebagai kegiatan prioritas kabupaten di provinsi NTB b. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan c. Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja d. Pengembangan kolaborasi pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa Barat e. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>ecotourism</i> dan pariwisata berkelanjutan f. Sosialisasi dan publikasi g. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan perikanan dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan pemerintah pusat dan donor (jika ada) 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan b. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur c. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan d. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan e. Pemanfaatan jasa lingkungan

		Kekuatan	Kelemahan
Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksinkronan perencanaan <i>stakeholders</i>, baik di Pusat maupun daerah 2. Pemahaman masyarakat terhadap zona konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari 3. Pembangunan pariwisata akan mengancam kehidupan konservasi 4. Status dan akses ke zona pemanfaatan 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan penelitian mendukung sinkronisasi pengawasan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan zona konservasi yang aman dan berkelanjutan b. Program penelitian dan pengembangan c. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona d. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat e. perlindungan habitat dan populasi Ikan f. Monitoring evaluasi (monev) sumber daya Kawasan g. Nota kesepahaman dengan dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di zona pemanfaatan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi b. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola c. Penyusunan panduan spesifikasi pembangunan dan pemanfaatan yang ketat d. Pengurusan perizinan yang transparan, teliti, dan tepat waktu e. Program pendidikan lingkungan hidup f. Mengembangkan sumber pendapatan organisasi yang sesuai ketentuan dan tujuan g. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi

Sumber: Hasil Pengolahan Data

4.3.2 Strategi Pengelolaan

Memperhatikan hasil pengembangan strategi yang disampaikan dalam tabel di atas, untuk mewujudkan visi pengelolaan BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, dirancang berbagai strategi untuk dapat menysasar tujuan pelestarian sumber daya laut di kawasan perairan wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. Strategi pengelolaan sesuai dengan Pasal 6 Permen KP Nomor PER.30/MEN/2010 yang menyebutkan bahwa strategi pengelolaan meliputi:

1. Penguatan kelembagaan
2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
3. Penguatan sosial ekonomi dan budaya.

Selanjutnya penyusunan Rencana Pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. perlu memperhatikan kepatuhan (*compliance*) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Keputusan Dirjen juga menjadi rambu-rambu dalam menentukan program kegiatan dan menjadi bahan untuk penyusunan monitoring dan evaluasi penilaian dalam operasionalisasi manajemen BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat ke depan sehingga bisa tercapai pengelolaan yang optimal. Beberapa strategi utama yang diperhatikan dan perlu dilakukan, adalah:

1. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kelembagaan. Strategi ini dimulai dari proses pemantapan kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, penerapan BLUD sampai pada pengembangannya ke depan, melalui upaya dan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) pengelola dan masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Strategi penguatan kelembagaan, meliputi peningkatan kapasitas organisasi pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat, pengembangan sarana dan prasarana, pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, pengembangan kolaborasi pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi di Sumbawa-Sumbawa Barat, pembentukan dan pengembangan jejaring Kawasan Konservasi, sosialisasi dan publikasi, serta monitoring evaluasi (monev).

2. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan mencakup dua sumber daya penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan strategi ini dikembangkan

program penelitian dan pengembangan, perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi, pemanfaatan jasa lingkungan, dan monev sumber daya kawasan.

Selain sumber daya ekosistem terumbu karang, pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat, memberikan perhatian khusus pada pengelolaan ekosistem mangrove dan padang lamun. Kedua ekosistem ini memiliki peran penting dalam menyediakan jasa lingkungan, termasuk sebagai pengatur iklim global dalam konteks perubahan iklim. Ekosistem mangrove dan padang lamun diakui memiliki kandungan karbon yang cukup signifikan, baik pada batang pohon dan daunnya (*above the ground*) maupun pada sedimennya (*below the ground*). Dengan menjaga kedua ekosistem tersebut dari kegiatan konversi/perubahan lahan, maka dengan sendirinya tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Strategi ini dikenal dengan *blue carbon* dan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim global.

3. Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat, dan monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.

4.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat adalah:

1. Pengelolaan Berbasis Ekosistem dan Adat

Arah pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat dilakukan dengan cara menyelaraskan/ mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Management*) dan pengelolaan berbasis adat (*Customary Based Management*). Hal ini tidak lain karena tingginya keunikan, keanekaragaman jenis flora dan fauna

serta ekosistem perairan, pesisir dan laut di Sumbawa-Sumbawa Barat. Untuk itu, BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat perlu dikelola secara efektif dan berkelanjutan oleh pengelola maupun berkolaborasi dengan masyarakat adat dan pemerintah kabupaten Sumbawa-Sumbawa Barat dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan adat dalam kerangka melestarikan keanekaragaman hayati laut, mempertahankan stok dan biomassa ikan serta mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat. Jadi arah kebijakan pengelolaan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan aliran jasa-jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang disesuaikan dan disinergikan dengan petuanan di setiap wilayah pengelolaan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat.

2. Pengelolaan Berbasis Zonasi

Wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat dikelola berdasarkan sistem zonasi. Pengembangan sistem zonasi bertujuan untuk membentuk dan melindungi kawasan konservasi perairan dan mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan baik di laut, sungai maupun danau air asin sebagai satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan. Selain itu, dimaksudkan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta mengembangkan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) di dalamnya sebagai bentuk pemanfaatan lestari (*sustainable use*) melalui pariwisata bahari dan budidaya laut (*marine culture*) berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan sistem zonasi Kawasan Konservasi di Sumbawa-Sumbawa Barat adalah untuk memastikan bahwa perairan pesisir dan laut dengan segala sumber daya hayati yang ada didalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas dan manfaat ekonomi jangka panjang.

3. Regulasi

Kebijakan pengelolaan Wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60/2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020, serta peraturan di tingkat daerah lainnya yang relevan.

4. Pengelolaan Kolaboratif

Pembangunan dan pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Sumbawa-Sumbawa Barat dapat pula dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, swasta, perguruan tinggi, masyarakat adat dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membangun jejaring kawasan konservasi perairan di wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat sebagai kawasan konservasi dan wilayah segitiga terumbu karang dunia.

Tabel 13. Strategi dan Kebijakan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan di wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Meningkatnya system pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Sumbawa-	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat , Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya,	1.Program penelitian habitat dan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, DAS, pesisir, dan pulau kecil	1.Mendorong dan memfasilitasi penelitian habitat dan ekosistem
		2.Pengawasan dan perlindungan habitat dan populasi Ikan,	2.Menetapkan peraturan dan panduan pembangunan dan pemanfaatan
		3.Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang	3.Menetapkan intervensi pemulihan bertahap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Sumbawa Barat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	tidak mungkin pulih tanpa intervensi,		
		4.Peningkatan kapasitas organisasi pengelola BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	4.Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas SDM BLUD UPTD	
		5.Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat,	5.Menetapkan anggaran peningkatan sarana prasarana	
		6.Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat,	6.Mengembangkan kawasan otoritatif di zona pemanfaatan	
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), Meningkatkan kemitraan dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi di Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	7.Pengembangan kolaborasi pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	7.Menetapkan kerja sama donor	
		8.Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat	8.Mengembangkan kerja sama jejaring kerja dengan kementerian/ lembaga terkait	
		Menjaga lokasi-lokasi pemijahan ikan (<i>fish spawning aggregation</i>),	1.Program penelitian dan pengembangan lokasi pemijahan ikan	1.Mendorong dan memfasilitasi penelitian pemijahan ikan
			2.Pengawasan dan perlindungan habitat	2.Menetapkan peraturan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dan lokasi pemijahan ikan	panduan pembangunan dan pemanfaatan kawasan
	Menjaga masyarakat adat dan masyarakat petuanan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Sasi).	1.Program penelitian dan pengembangan masyarakat adat	1.Memfasilitasi penelitian masyarakat adat
		2.Pemanfaatan jasa lingkungan	2.Mengoptimalkan jasa lingkungan
		3.Program pendidikan lingkungan hidup	3.Menganggarkan dan bekerjasama bidang pendidikan lingkungan hidup
		4.Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi	4.Mengembangkan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat
		5.Monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat	5.Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak masyarakat
		6.Sosialisasi dan publikasi	6.Menetapkan kerja sama sosialisasi dan publikasi kawasan perairan Sumbawa-Sumbawa Barat
		7.Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat	7.Berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat adat

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Program dan Indikator

Memperhatikan peta strategi dan tujuan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka secara umum ada 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dalam 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah, meliputi:
 - a. Penetapan kelembagaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat sebagai unit organisasi pengelola dengan menerapkan BLUD.
 - b. Peningkatan kapasitas pengelolaan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Pemantapan administrasi pengelolaan.
 - c. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan khususnya Kawasan Konservasi
 - d. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan khususnya Kawasan Konservasi
 - e. Membangun komunikasi dan publikasi yang baik.
 - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
 - g. Peningkatan kapasitas BLUD UPTD Pegawai dalam hal pengelolaan Kawasan dan upaya perwujudan pendanaan berkelanjutan.
2. Program Pengelolaan Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Koordinasi pengelolaan Kawasan Konservasi.
 - b. Pengelolaan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan.
 - c. Pelaporan dana hibah yang berasal dari NGO atau pemberi Hibah lainnya.
 - d. Mobilisasi personel dan logistik.
 - e. Patroli Pengawasan.
 - f. Monitoring dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan.

- g. Pengembangan jasa ekowisata.
- 3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Pengelolaan dana masyarakat.
 - b. Penjangkauan dan pengembangan ekonomi.
 - c. Memperkuat POKMASWAS dan/atau tim jaga laut.
 - d. Dukungan terhadap budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya untuk uraian sasaran, indikator dan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan (d disesuaikan dengan periode renstra) sebagaimana terlibat pada tabel berikut.

Tabel 14. Sasaran, Indikator dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai	A	800,950,400	A	1,474,205,500	A	1,195,457,500	A	1,195,457,500
		3.25.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	Paket	1.00	84,936,900	1.00	162,000,000	1.00	162,000,000	1.00	162,000,000
		3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Renstra dan Renja	paket	1.00	19,152,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000
		3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	Jumlah Dokumen Lkip yang tersusun	paket	1.00	4,384,900	1.00	12,000,000	1.00	12,000,000	1.00	12,000,000
		3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja BLUD	Jumlah Laporan Hasil Monev yang tersusun	tahun	1.00	61,400,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000
		3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun	paket	1.00	148,720,000	1.00	148,720,000	1.00	178,720,000	1.00	178,720,000
		3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Jumlah Non ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	paket	1.00	136,752,000	1.00	136,752,000	1.00	186,752,000	1.00	186,752,000
		3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	paket	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan keuangan yang tersusun	paket	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000	1.00	4,384,000
		3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Analisis Prognosis	bulan	12.00	3,200,000	12.00	3,200,000	12.00	3,200,000	12.00	3,200,000
		3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun	paket	1.00	285,000	1.00	285,000	1.00	285,000	1.00	285,000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan rencana kebutuhan barang milik daerah	paket	1.00	285,000	1.00	285,000	1.00	285,000	1.00	285,000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan pendapatan BLUD	Paket	1.00	6,000,000	1.00	6,000,000	1.00	6,000,000	1.00	6,000,000
			Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan Perencanaan pendapatan BLUD	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
			Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan Kebijakan Pendapatan BLUD	Laporan pengelolaan pendapatan	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
			Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD	Laporan pendapatan yang tersusun	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
		3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun	paket	1.00	25,741,000	1.00	26,433,000	1.00	38,919,000	1.00	38,919,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan data administrasi kepegawaian	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
		3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bahan logistik kantor yang tersedia	tahun	1.00	3,041,000	1.00	3,733,000	1.00	16,219,000	1.00	16,219,000
		3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	tahun	1.00	500,000	1.00	500,000	1.00	500,000	1.00	500,000
		3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang tersedia	paket	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
		3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	paket	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000
		3.25.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan publikasi dan Monev PPID	paket	1.00	3,200,000	1.00	3,200,000	1.00	3,200,000	1.00	3,200,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	paket	1.00	500,000,000	1.00	1,100,000,000	1.00	802,975,000	1.00	802,975,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	paket	1.00	500,000,000	1.00	1,100,000,000	1.00	802,975,000	1.00	802,975,000
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	paket	1.00	35,267,500	1.00	30,767,500	1.00	45,447,500	1.00	45,447,500

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pemerintahan Daerah										
		3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	Tahun	1.00	4,780,000	1.00	280,000	1.00	10,060,000	1.00	10,060,000
		3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Tahun	1.00	30,487,500	1.00	30,487,500	1.00	35,487,500	1.00	35,487,500
		3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	paket	1.00	157,895,000	1.00	157,895,000	1.00	157,895,000	1.00	157,895,000
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	paket	1.00	234,550,000	8.74	375,500,000	9.50	563,200,000	9.50	563,200,000
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	paket	1.00	82,800,000	1.00	180,300,000	1.00	112,700,000	1.00	112,700,000
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri	paket	1.00	950,000,000	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Konservasi yang direhabilitasi	paket	1.00	41,400,000	1.00	48,600,000	1.00	91,500,000	1.00	91,500,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jenis kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan PPK yang terlaksana	paket	1.00	41,400,000	1.00	131,700,00	1.00	21,200,000	1.00	21,200,000
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persetujuan teknis/rekomendasi pemafaatan ruang laut	paket	1.00	30,000,000			1.00	361,800,000	1.00	361,800,000
		3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah SOP yang tersusun	paket	1.00	30,000,000			1.00	361,800,000	1.00	361,800,000
		3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi	paket	1.00	121,750,000	1.00	195,200,000	1.00	88,700,000	1.00	88,700,000
			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitasnya	Tahun	-		1.00	44,900,000				
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kelembagaannya	Bulan	12.00	66,800,000	12.00	51,800,000	12.00	46,800,000	12.00	46,800,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang ikut terlibat	Bulan	12.00	54,950,000	12.00	71,800,000	12.00	41,800,000	12.00	41,800,000
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sosialisasi teknologi informasi serta Pendidikan dan pelatihan	Bulan	-		12.00	26,700,000	12.00	100,000	12.00	100,000
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	paket	1.00	40,650,000	99.92	143,600,000	99.93	114,200,000	99.93	114,200,000
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa	paket	1.00	40,650,000	1.00	143,600,000	1.00	114,200,000	1.00	114,200,000
		3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah operasi	paket	1.00	40,650,000	1.00	91,800,000	1.00	61,800,000	1.00	61,800,000

TUJUAN	SASARAN		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
						2024		2025		2026			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi	paket	1.00	130,005,000	1.00	158,605,000	1.00	158,605,000	1.00	158,605,000
		3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Budidaya Perikanan yang terawasi	paket	-		1.00	51,800,000	1.00	52,400,000	1.00	52,400,000
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbina	paket	1.00	320,000,000	1.00	320,000,000	1.00	320,000,000	1.00	320,000,000

5.2 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat antara lain bersumber dari jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan, Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Persetujuan Penangkapan Ikan yang Bukan untuk Tujuan Komersial Dalam Rangka Kesenangan dan Wisata, Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut, Dalam kaitan itu, akan diberlakukan pengenaan tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat pemanfaat. Tarif Layanan dimaksud disusun atas dasar harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan/unit layanan, hasil per investasi dana oleh BLUD selama periode tertentu dan perhitungan/penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Tarif Layanan berupa besaran tarif (nilai nominal uang) dan/atau pola tarif (persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih).

Selain itu, Pendapatan dapat pula berasal dari sumber lain yang sah melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini dilakukan melalui pembentukan unit usaha di bawah BLUD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat Kawasan Konservasi. Penerimaan BLUD dapat berasal dari APBD, Tarif Jasa Lingkungan yang dikenakan kepada pemanfaat kawasan, wisatawan yang mengunjungi kawasan, pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. Proyeksi penerimaan sebagai berikut:

Tabel 15. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2023-2026

Biaya	2023	2024	2025	2026
Dana Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan	643.730.000	1.100.070.000	2.025.695.000	1.971.295.000
Hibah <i>Blue</i> Abadi				
Hibah dari sumber lain (Hibah)				
Dana APBD Provinsi	3.327.951.500	3.153.951.500	2.308.051.500	1.788.051.500
Pendapatan Lain-lain				
Total Penerimaan	3.971.681.500	4.254.021.500	4.333.746.500	3.759.346.500

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis digunakan sebagai acuan bagi pengelola dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengelola dan melindungi ekosistem perairan dan jasa-jasa lingkungannya. Penerapan BLUD pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dari setiap pegawai dan partisipasi masyarakat, serta dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat dalam melaksanakan pelayanan sebagai upaya mencapai target kinerja layanan dan manajemen BLUD UPTD yang efektif, efisien dan berkualitas dan berkelanjutan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH